

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini memerlukan landasan teori berupa penelitian terdahulu untuk mendukung data penelitian, berikut hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini :

Tabel 2. 1 Penellitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Pramesti, R.F., Firdaus, A.A., Yulita, K., & Thoyyibah, M. (2025)	Analisis Efisiensi APBN Era Prabowo: Kajian Ekonomi dan Analisis Sentimen Publik	Variabel 1: Pagu Anggaran K/L (Rp) Variabel 2: Nilai Efisiensi Anggaran (Rp) Variabel 3: Sentimen Publik (Positif/Negatif/Netral). (Mix Method)	Hasil penelitian membuktikan korelasi sangat kuat antara pagu dan efisiensi. Hanya 7 dari 78 K/L efisiensi tinggi. Sentimen publik dominan positif terhadap MBG namun model masih bias akibat class imbalance.
Fitria et al. (2025)	Pengaruh Harga Minyak Dunia dan Belanja Infrastruktur	Y: Keseimbangan Anggaran X1: Harga minyak Dunia, X2: Belanja Infrastruktur	Hasil penelitian menunjukkan harga minyak dunia tidak berpengaruh

	terhadap Keseimbangan Anggaran Pemerintah Indonesia 2015-2024	(Metode Kuantitatif)	signifikan terhadap keseimbangan anggaran, belanja infrastruktur Berpengaruh signifikan, dan harga minyak dunia dan belanja infrastruktur berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keseimbangan anggaran.
Kusumasari, W.N. & Soebagiyo, D. (2024)	Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Defisit Anggaran di Indonesia Tahun 2002–2022	Y: Defisit Anggaran (Rp Miliar) X1: Nilai Tukar (Rp/USD) X2: Investasi (Rp Miliar) X3: Inflasi (%). Metode Kuantitatif OLS.	Hasil penelitian menunjukkan Nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap defisit. Investasi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap defisit anggaran.
Fridana, F.C. (2023)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APBN Periode	Y: APBN Total (Rp Miliar) X1: Kurs Rupiah (Rp/USD) X2: Inflasi (%) X3: Harga	Hasil penelitian membuktikan Inflasi positif signifikan

	1999–2020	Minyak Dunia (USD/barel). Metode Kuantitatif PAM.	Jangka panjang dengan definisi +1% inflasi → APBN naik 37,98%. Kurs tidak signifikan. Harga minyak tidak signifikan.
Damayanti, N.P. & Marselina (2022)	Pengaruh SUN, SBSN, Inflasi, Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Defisit APBN di Indonesia Periode 2009Q1-2021Q4	Y: Defisit APBN (Rp Triliun) X1: SUN (Rp Miliar) X2: SBSN (Rp Miliar) X3: Inflasi (%) X4: Nilai Tukar (Rp/USD) X5: Pertumbuhan Ekonomi (%). Metode Kuantitatif ECM.	Hasil penelitian menunjukkan SUN negatif signifikan terhadap defisit. SBSN positif tidak signifikan. Inflasi tidak signifikan. Nilai tukar positif signifikan. Pertumbuhan ekonomi negatif signifikan.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu pada Tabel 2.1 diatas, diketahui bahwa penelitian-penelitian tersebut telah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini, namun belum ada satu pun yang mengkaji secara empiris determinan saldo APBN Indonesia menggunakan data frekuensi bulanan pada periode 2024-2026 dengan variabel berbasis pertumbuhan *Year-on-Year* (YoY). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab perumusan masalah serta melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan instrumen strategis yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk memengaruhi kondisi perekonomian nasional melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan pengelolaan instrumen fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Kelen (2025) menegaskan bahwa kebijakan fiskal memegang peranan penting karena dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengelolaan belanja publik yang efisien dan produktif. Berdasarkan perspektif teoritis yang dikutip dalam beberapa penelitian terdahulu, kebijakan fiskal dibedakan atas dua jenis utama. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan melalui peningkatan belanja negara atau pengurangan beban pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini umumnya menyebabkan peran APBN menjadi lebih besar dalam perekonomian dan dapat meningkatkan risiko defisit anggaran apabila kenaikan belanja tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan negara. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah untuk memperlambat laju perekonomian yang terlalu panas (Kelen, 2025). Albani (2025) menambahkan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi publik, intervensi negara melalui kebijakan fiskal merupakan bentuk legitimasi normatif untuk mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*) sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro. Selain dua jenis kebijakan fiskal tersebut, dalam praktik pengelolaan keuangan negara dikenal pula konsep konsolidasi fiskal.

Fase ekspansi fiskal dalam penelitian ini ditandai dengan peningkatan belanja yang signifikan defisit hingga 2,92% PDB, kontraksi penerimaan pajak hingga -14,7% YoY, dan lonjakan belanja pemerintah pusat hingga +47,7% YoY yang mencerminkan pergeseran orientasi fiskal yang dipicu oleh pergantian kepemimpinan nasional dan peluncuran program-program prioritas berskala besar. Dalam konteks Indonesia periode 2024-2026, pemerintahan Prabowo Subianto menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara masif. Damayanti & Marselina

(2022) menjelaskan bahwa pemerintah menempuh kebijakan defisit anggaran untuk menjaga momentum dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stimulus fiskal. Kebijakan ekspansif seperti ini apabila tidak dikelola secara produktif dan akuntabel, berpotensi menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang (Albani, 2025). Oleh karena itu, pemahaman empiris tentang faktor-faktor yang paling memengaruhi dinamika saldo APBN di era ekspansi menjadi sangat penting dan mendesak. Menurut Pramesti et al (2025), kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025 mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" melalui revitalisasi industri, termasuk hilirisasi dan penguatan kebijakan fiskal struktural secara menyeluruh. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui tiga pilar reformasi fiskal yang digagas Kementerian Keuangan yang berfokus pada optimalisasi penerimaan perpajakan, peningkatan efektivitas belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan yang sehat. Pelaksanaan ketiga pilar tersebut berpotensi memengaruhi dinamika saldo APBN karena berkaitan langsung dengan perubahan kinerja penerimaan negara, belanja pemerintah, dan stabilitas ekonomi makro yang tercermin melalui tingkat inflasi.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

A. Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal utama pemerintah yang berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (7), APBN didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memuat daftar sistematis dan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.

APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akuntansi keuangan negara, tetapi juga sebagai wujud nyata dari pilihan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional (Pramesti et al., 2025). APBN juga berfungsi sebagai dasar otorisasi pelaksanaan pendapatan dan belanja, pedoman

perencanaan kegiatan, serta instrumen penilaian realisasi kegiatan pemerintah. Dalam kerangka Musgrave, saldo APBN merupakan outcome yang paling langsung dan menyeluruh mencerminkan keberhasilan atau kegagalan seluruh kebijakan fiskal dalam satu periode. Tidak ada variabel tunggal lain yang mampu merangkum keseimbangan fiskal secara holistik selain saldo APBN itu sendiri, karena di dalamnya sudah terangkum interaksi antara penerimaan, pengeluaran, dan pengaruh kondisi makroekonomi seperti inflasi. Sementara dalam kerangka Keynesian, saldo APBN adalah variabel yang paling langsung mencerminkan intensitas ekspansi atau kontraksi fiskal.

B. Komponen APBN

APBN terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan. Pertama, pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah di mana penerimaan perpajakan menjadi sumber terbesar dengan nilai Rp2.490,9 triliun pada tahun 2025 dari total pendapatan Rp3.005,1 triliun. Kedua, belanja negara yang merupakan seluruh pengeluaran pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun, sehingga total belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Ketiga, pembiayaan anggaran yang meliputi pembiayaan utang, pembiayaan investasi, dan pemberian pinjaman, yang berfungsi menutup selisih antara pendapatan dan belanja negara (Pramesti et al., 2025). Albani (2025) menegaskan bahwa APBN diatur dalam landasan hukum yang hierarkis dan komprehensif, mulai dari Pasal 23 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hingga undang-undang APBN tahunan yang ditetapkan melalui proses persetujuan DPR.

C. Fungsi APBN

APBN menjalankan tiga fungsi utama yang dikenal sebagai Trilogi Fungsi Fiskal Musgrave. Pramesti et al (2025) menjelaskan ketiga fungsi tersebut, yang pertama fungsi alokasi, yaitu alokasi anggaran dalam mendorong efisiensi ekonomi, investasi, dan produktivitas, kedua fungsi

pemerataan, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dengan penerapan sistem perpajakan yang adil, dan ketiga fungsi stabilisasi, yaitu fungsi anggaran sebagai peredam dampak gejolak perekonomian global dan domestik. Albani (2025) mengelaborasi bahwa melalui APBN, negara menjalankan fungsi alokasi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial yang tidak dapat disediakan optimal oleh mekanisme pasar, fungsi distribusi untuk mengurangi ketimpangan melalui subsidi dan bantuan sosial, serta fungsi stabilisasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro termasuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan. Ketiga fungsi Musgrave ini menjadi dasar teoritis yang menjelaskan mengapa saldo APBN merupakan variabel dependen yang tepat untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal secara keseluruhan, karena surplus atau defisit yang terjadi mencerminkan keberhasilan atau kegagalan ketiga fungsi tersebut dalam satu periode anggaran.

2.2.3 Saldo APBN

Saldo APBN merupakan indikator utama keseimbangan fiskal pemerintah yang mencerminkan kemampuan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran dari penerimaan yang tersedia. Dalam konteks keuangan negara, penting untuk membedakan antara Saldo APBN dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Saldo APBN merupakan selisih antara realisasi pendapatan negara dengan realisasi belanja negara, yang mencerminkan posisi fiskal pemerintah sebelum memperhitungkan komponen pembiayaan anggaran. Secara formal, defisit anggaran adalah keadaan di mana pendapatan negara lebih rendah dibandingkan dengan pengeluarannya, sehingga negara harus mencari sumber pembiayaan tambahan untuk menutup kekurangan tersebut (Kusumasari & Soebagiyo, 2024). Selisih antara pendapatan negara dan belanja negara tersebut dapat bernilai positif (surplus) maupun negatif (defisit) (Damayanti & Marselina, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (3), defisit APBN Indonesia dibatasi maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah utang tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB (UU No. 17 Tahun 2003). Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fiskal

dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam penelitian ini, Saldo APBN tidak dianalisis berdasarkan nilai absolutnya, tetapi berdasarkan perubahan kondisinya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah posisi fiskal pemerintah mengalami perbaikan atau perburukan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga perubahan kondisi fiskal dapat diamati tanpa dipengaruhi pola musiman (*seasonality*) pada data bulanan. Sementara itu, SiLPA atau SiKPA merupakan hasil akhir setelah saldo APBN ditambahkan dengan pembiayaan neto, yakni selisih antara penerimaan pembiayaan (termasuk penerbitan Surat Berharga Negara dan pinjaman) dengan pengeluaran pembiayaan (termasuk cicilan pokok utang dan penyertaan modal negara). Secara matematis, hubungan keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SiLPA/SiKPA} = \text{Saldo APBN} + \text{Pembiayaan Neto}$$

Apabila SiLPA bernilai positif, artinya terdapat sisa kas yang dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Sebaliknya, apabila SiKPA bernilai negatif, artinya pembiayaan yang tersedia tidak mencukupi untuk menutup defisit yang terjadi. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Saldo APBN bulanan murni bukan SiLPA/SiKPA, karena saldo APBN secara langsung mencerminkan keseimbangan antara kinerja penerimaan dan belanja negara tanpa dipengaruhi oleh komponen pembiayaan yang bersifat akuntansi. Saldo APBN bulanan murni adalah saldo APBN yang diperoleh melalui dekomposisi data kumulatif APBN KiTa menjadi realisasi per bulan sehingga setiap observasi merepresentasikan transaksi fiskal pada bulan tersebut, bukan akumulasi sejak awal tahun. Pemilihan saldo APBN sebagai variabel dependen juga konsisten dengan tujuan penelitian yang ingin mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan penerimaan perpajakan, pertumbuhan belanja pemerintah pusat, dan inflasi terhadap posisi fiskal pemerintah secara langsung. Oleh karena itu, penelitian menggunakan saldo APBN bulanan murni yang dioperasikan melalui *Year-on-Year Difference* sehingga fluktuasi kondisi fiskal bulanan dapat diamati dan dibandingkan secara lebih representatif dibandingkan data tahunan maupun data kumulatif (YTD).

Tabel 2. 2 Perbedaan Saldo APBN dan SiLPA

Aspek	Saldo APBN	SiLPA/SiKPA
Definisi	Selisih pendapatan negara dikurangi belanja negara.	Saldo APBN ditambah pembiayaan neto.
Rumus	Pendapatan – Belanja	Saldo APBN + Pembiayaan Neto
Cakupan	Sebelum memperhitungkan pembiayaan	Setelah memperhitungkan pembiayaan
Nilai Positif	Surplus fiskal	Sisa kas tersedia
Nilai Negatif	Defisit fiskal	Kas tidak mencukupi
Konteks Utama	APBN pemerintah pusat	Lebih umum di APBD Daerah

2.2.4 Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh negara dari rakyat berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara guna mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam postur APBN, penerimaan perpajakan merupakan komponen terbesar sisi pendapatan negara yang menyumbang lebih dari 80% total penerimaan negara dan menjadi fondasi utama pembiayaan seluruh program pembangunan (Kementerian Keuangan, 2024). Pertumbuhan penerimaan perpajakan adalah tingkat perubahan realisasi penerimaan pajak negara dalam suatu periode dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase (*Year-on-Year/YoY*). Pertumbuhan penerimaan perpajakan dihitung sebagai berikut:

$$X1 (\% \text{ YoY}) = \frac{(\text{Pajak Bulanan Murni } t - \text{Pajak Bulanan Murni } t-12)}{\text{Pajak Bulanan Murni } t-12} \times 100\%$$

Variabel Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini bukan nilai absolut penerimaan perpajakan (dalam Rp), melainkan

persentase pertumbuhan Year-on-Year (% YoY). Persentase pertumbuhan Year-on-Year dipilih karena mampu menggambarkan perubahan kinerja penerimaan perpajakan secara relatif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sehingga lebih tepat digunakan untuk menganalisis dinamika fiskal dibandingkan nilai nominal. Selain itu, penggunaan persentase memudahkan interpretasi koefisien regresi terhadap perubahan kondisi Saldo APBN. Fridana (2023) dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi APBN menggunakan *Partial Adjustment Model* (PAM) di mana koefisien regresi yang dihasilkan diinterpretasikan sebagai besaran perubahan relatif sebuah pendekatan yang secara implisit mengakui keunggulan pengukuran berbasis pertumbuhan (%) dalam menghasilkan estimasi yang lebih bermakna dan dapat dibandingkan. Ketika nilai pertumbuhan bernilai positif, berarti penerimaan perpajakan bulan tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap saldo APBN. Sebaliknya, ketika pertumbuhan bernilai negatif (kontraksi), penerimaan pajak mengalami penurunan yang berpotensi memperlebar defisit APBN. Tahun 2024-2026, dinamika pertumbuhan penerimaan perpajakan menunjukkan pola yang sangat berfluktuasi.

Pertumbuhan Penerimaan perpajakan mulai terkontraksi sebesar -8,2% YoY pada Triwulan I-2024, -7,0% YoY pada Triwulan II-2024, dan baru kembali tumbuh positif sebesar 3,6% YoY pada Triwulan IV-2024 (Kementerian Keuangan, 2025). Memasuki tahun 2025, kondisi pertumbuhan penerimaan perpajakan masih mengalami tekanan yang cukup besar. Pada semester I tahun 2025, penerimaan perpajakan masih mengalami kontraksi sekitar -14,7% (YoY) akibat perlambatan ekonomi global, moderasi harga komoditas, tingginya restitusi pajak, serta dinamika implementasi reformasi administrasi perpajakan. Memasuki semester II 2025, kondisi penerimaan perpajakan mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan positif sekitar 2,1% (YoY), namun secara tahunan, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2025 masih mengalami kontraksi sebesar -0,7% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan perpajakan masih mengalami tekanan di tengah kebijakan APBN yang tetap diarahkan secara ekspansif untuk mendukung program prioritas nasional. Kondisi ini menunjukkan betapa sensitifnya saldo APBN terhadap

dinamika pertumbuhan penerimaan perpajakan.

Teori yang secara langsung melandasi variabel Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan adalah Tax Buoyancy Theory. Teori ini mengukur elastisitas atau responsivitas pertumbuhan penerimaan pajak terhadap perubahan aktivitas ekonomi, yang menggambarkan seberapa besar pertumbuhan penerimaan pajak untuk setiap satu persen pertumbuhan PDB tanpa perubahan kebijakan perpajakan. Apabila tax buoyancy lebih dari 1 (*elastic*), penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dari PDB sehingga berpotensi memperbaiki kondisi saldo APBN secara signifikan. Sebaliknya apabila kurang dari 1 (*inelastic*), pertumbuhan pajak lebih lambat dari PDB sehingga kemampuan fiskal dalam menutup belanja semakin terbatas. Kirana Dewi et al (2023) mengkonfirmasi relevansi teori ini dengan merekomendasikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan pajak agar tercapai surplus dan dapat membatasi defisit anggaran yang mencerminkan prinsip Tax Buoyancy bahwa kapasitas perpajakan harus tumbuh searah dan proporsional dengan kapasitas ekonomi.

2.2.5 Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat adalah tingkat perubahan realisasi belanja pemerintah pusat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase (*Year-on-Year/YoY*) (Kementerian Keuangan, 2026). Ketika nilai pertumbuhan bernilai tinggi (positif dan besar), berarti pemerintah meningkatkan belanja secara agresif dibandingkan tahun lalu, sehingga sisi pengeluaran APBN meningkat dan berpotensi menekan saldo APBN menuju defisit, terutama jika pertumbuhan penerimaan tidak mengimbangi. Sebaliknya, pertumbuhan belanja yang rendah atau melambat mengindikasikan pengendalian fiskal yang memberi ruang bagi perbaikan saldo APBN (Fitria et al., 2025). Formulasinya adalah:

$$\text{X2 (\% YoY)} = [(\text{Belanja PP Bulanan Murni } t - \text{Belanja PP Bulanan Murni } t-12) / \text{Belanja PP Bulanan Murni } t-12] \times 100\%$$

Tahun 2024-2026 menunjukkan dinamika pertumbuhan belanja pemerintah pusat sangat ekstrem. Pertumbuhan belanja pemerintah pusat tercatat mencapai +47,7% YoY pada Triwulan I-2026 salah satu yang tertinggi dalam sejarah APBN modern Indonesia (Kementerian Keuangan, 2026). Akselerasi ini dipicu oleh

implementasi penuh program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis, hilirisasi mineral, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan (Pramesti et al., 2025). Tingginya pertumbuhan belanja diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pelebaran defisit APBN, sehingga menjustifikasi penempatan variabel ini sebagai X2 dalam penelitian ini. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non-K/L yang mencakup pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain (UU No. 17 Tahun 2003). Dalam penelitian ini digunakan total belanja pemerintah pusat bukan sekadar belanja infrastruktur atau belanja K/L karena komponen inilah yang paling tepat mencerminkan ekspansi fiskal pemerintah secara keseluruhan (Fitria et al., 2025).

Teori utama yang melandasi variabel Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat adalah Hukum Wagner (Wagner's Law). Hukum ini menyatakan bahwa seiring perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu negara, pengeluaran pemerintah cenderung tumbuh secara proporsional lebih besar dari pertumbuhan PDB fenomena yang dikenal sebagai "*growing public expenditure*." Kelen (2025) mengkonfirmasi berlakunya Hukum Wagner di Indonesia dengan mengamati bahwa belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah cenderung terus meningkat secara struktural dari tahun ke tahun seiring tuntutan pembangunan. Fitria et al (2025) membuktikan secara empiris relevansi Hukum Wagner dengan menemukan bahwa belanja infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan anggaran pemerintah Indonesia yang mengafirmasi bahwa ekspansi belanja pemerintah merupakan fenomena yang bersifat struktural dengan dampak nyata terhadap saldo fiskal. Albani (2025) melengkapi pemahaman ini dengan memperingatkan bahwa dalam konteks APBN 2026, kenaikan belanja dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan *crowding out effect* yang mereduksi investasi swasta dan pada akhirnya membatasi efek positif ekspansi fiskal.

Variabel X2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara *Year-on-Year* (% YoY), bukan nilai absolutnya. Pertumbuhan YoY ini mencerminkan seberapa agresif peningkatan realisasi belanja dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang merupakan indikator langsung dari intensitas ekspansi fiskal yang sedang berlangsung dalam

suatu periode tertentu. Pemilihan format ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi koefisien regresi, sehingga setiap perubahan sebesar 1% pada variabel pertumbuhan belanja pemerintah pusat dapat diinterpretasikan sebagai perubahan pada variabel Saldo APBN sesuai dengan nilai koefisien regresi yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Fitria et al (2025) dalam penelitiannya menggunakan variabel belanja infrastruktur sebagai representasi belanja pemerintah dan menganalisis pengaruhnya secara langsung terhadap keseimbangan anggaran, mengafirmasi bahwa perubahan belanja pemerintah memiliki implikasi langsung dan terukur terhadap saldo APBN. Sebagai pelengkap Hukum Wagner, variabel Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat juga didukung oleh Teori Pengeluaran Pemerintah Keynesian yang menjelaskan mekanisme transmisi bagaimana pertumbuhan belanja pemerintah memengaruhi keseimbangan fiskal. Namun ketika ekspansi belanja tidak proporsional dengan pertumbuhan penerimaan, maka defisit akan melebar dan tekanan fiskal jangka panjang meningkat sebuah kondisi yang persis terjadi pada era ekspansi fiskal di Indonesia.

2.2.6 Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu (BPS, 2024). Inflasi merupakan salah satu tolak ukur perekonomian suatu negara yang stabilitasnya menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat (Damayanti & Marselina, 2022). Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi tiga jenis utama. Pertama, *demand-pull inflation* yaitu inflasi yang terjadi akibat peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi. Kondisi ini dapat terjadi ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran secara masif melalui kebijakan fiskal ekspansif sehingga uang yang beredar di masyarakat meningkat (Kirana Dewi et al., 2023). Kedua, *cost-push inflation* yaitu inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku atau upah minimum. Ketiga, *built-in inflation* atau inflasi struktural yang terjadi akibat ekspektasi inflasi masa lalu yang tertanam dalam perilaku pelaku ekonomi (Pramesti et al., 2025). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi Indonesia diterbitkan setiap bulan dalam tiga format pengukuran: bulanan (*Month-to-Month/MtM*), tahun kalender (*Year-to-Date/YtD*), dan tahunan (*Year-on-*

Year/YoY). Dalam penelitian ini, inflasi digunakan dalam format *YoY* agar konsisten dengan variabel *X1* dan *X2* yang juga berbasis pertumbuhan *YoY*, sehingga seluruh variabel bersifat *apple to apple* dalam model regresi.

Year on Year (YoY) merupakan metode pengukuran pertumbuhan dengan membandingkan nilai suatu indikator pada periode tertentu dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Misalnya, pertumbuhan penerimaan perpajakan Januari 2025 dibandingkan dengan Januari 2024, Februari 2025 dibandingkan dengan Februari 2024, dan seterusnya. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat perubahan yang benar-benar terjadi pada bulan yang sama sehingga pengaruh faktor musiman (*seasonality*) dapat diminimalkan. Oleh karena itu, *YoY* lebih menggambarkan dinamika pertumbuhan dari waktu ke waktu karena setiap bulan dibandingkan dengan basis yang sama pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, *Year to Date (YtD)* merupakan metode yang menggunakan data kumulatif sejak awal tahun sampai periode tertentu. Sebagai contoh, realisasi penerimaan perpajakan *YtD* Mei 2025 merupakan akumulasi penerimaan dari Januari hingga Mei 2025 yang kemudian dibandingkan dengan akumulasi Januari hingga Mei 2024.

Dengan demikian, nilai *YtD* tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja pada bulan Mei, tetapi juga dipengaruhi oleh seluruh realisasi pada bulan-bulan sebelumnya. Perbedaan mendasar antara kedua metode tersebut terletak pada dasar perbandingannya. *YoY* membandingkan satu bulan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya sehingga lebih mencerminkan perubahan aktual pada periode tersebut. Sementara itu, *YtD* menggunakan data akumulasi sehingga perubahan yang terjadi pada suatu bulan dapat tertutupi atau dipengaruhi oleh realisasi pada bulan-bulan sebelumnya. Teori utama yang melandasi variabel *X3* (Inflasi) adalah Fisher Effect yang dirumuskan oleh Irving Fisher. Teori ini menjelaskan hubungan antara tingkat inflasi dengan kondisi keuangan suatu negara melalui dua jalur yang berlawanan secara bersamaan. Jalur pertama (positif terhadap penerimaan) yaitu inflasi meningkatkan nilai transaksi ekonomi secara nominal, sehingga basis pajak seperti PPN yang berbasis nilai transaksi dan PPh yang berbasis keuntungan nominal akan meningkat, berpotensi menaikkan penerimaan perpajakan dan memperbaiki sisi pendapatan APBN.

Kirana Dewi et al (2023) mengkonfirmasi jalur ini dengan menyatakan bahwa inflasi sebagai salah satu basis APBN akan memengaruhi besaran penerimaan pajak terutama PPh dan PPN. Jalur kedua (negatif terhadap pengeluaran) yaitu inflasi meningkatkan beban belanja pemerintah, terutama belanja subsidi energi, pangan, dan bantuan sosial, serta mendorong penyesuaian gaji pegawai yang menekan saldo APBN dari sisi pengeluaran. Damayanti & Marselina (2022) mengkonfirmasi jalur ini dengan menjelaskan bahwa kenaikan harga berdampak pada biaya pengembangan program pemerintah yang semakin meningkat sehingga belanja yang telah dianggarkan menjadi tidak mencukupi dan memaksa penyesuaian APBN. Teori pendukung variabel X3 dalam penelitian ini juga dilandasi oleh Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory of Money*) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang beredar yang sering menjadi sarana pembiayaan defisit anggaran merupakan penyebab utama inflasi. Damayanti & Marselina (2022) mengutip bahwa kaum monetaris berpendapat bahwa peningkatan jumlah uang beredar adalah salah satu penyebab terjadinya inflasi, dan defisit anggaran merupakan faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah uang beredar tersebut. Fenomena deflasi yang terjadi pada Februari 2025 sebesar -0,09% YoY yang merupakan fenomena langka dalam sejarah fiskal Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi inflasi dengan kondisi fiskal yang patut untuk diteliti secara empiris pada periode ini.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan terhadap Saldo APBN

Pertumbuhan penerimaan perpajakan memiliki hubungan positif terhadap saldo APBN. Ketika penerimaan perpajakan tumbuh secara signifikan, komponen pendapatan negara meningkat sehingga defisit APBN akan mengecil atau bahkan berbalik menjadi surplus. Sebaliknya, kontraksi penerimaan pajak seperti yang terjadi pada 2024 di mana pajak mengalami kontraksi sepanjang tiga triwulan berturut-turut secara langsung menekan saldo APBN menuju defisit yang semakin dalam (Kementerian Keuangan, 2025).

Hipotesis 1 (H1): Pertumbuhan penerimaan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap saldo APBN.

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat terhadap Saldo APBN

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat memiliki hubungan negatif terhadap saldo APBN. Sesuai dengan Hukum Wagner dan teori Keynesian, peningkatan belanja pemerintah yang tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan yang proporsional akan menekan saldo APBN menuju defisit yang semakin besar. Fitria et al (2025) membuktikan secara empiris bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan anggaran Indonesia. Pertumbuhan belanja yang sangat agresif menjadi tekanan fiskal yang nyata terhadap saldo APBN apabila tidak diimbangi dengan penerimaan.

Hipotesis 2 (H2): Pertumbuhan belanja pemerintah pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap saldo APBN.

2.3.3 Pengaruh Inflasi terhadap Saldo APBN

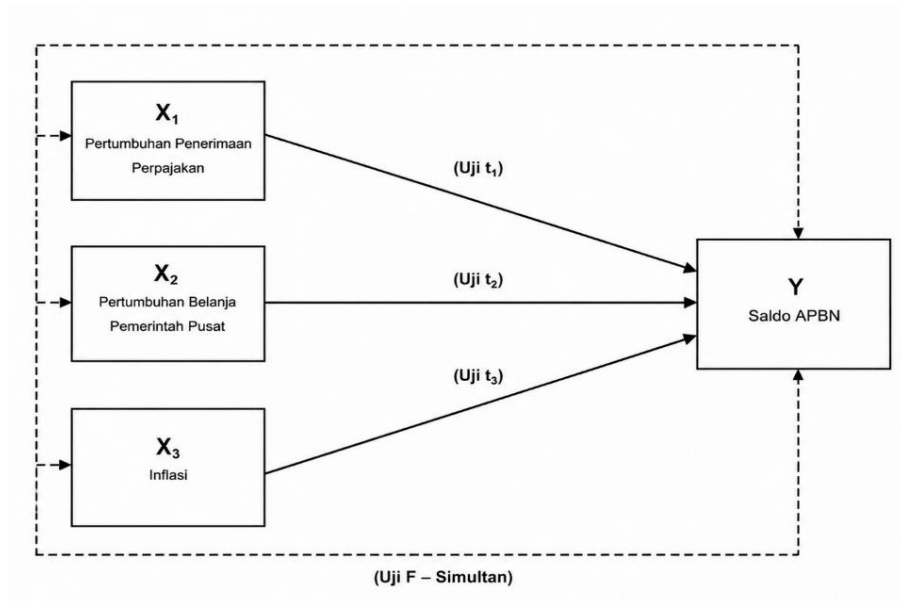
Pengaruh inflasi terhadap saldo APBN bekerja melalui dua jalur yang berlawanan sesuai Fisher Effect (Kirana Dewi et al., 2023). Dalam konteks Indonesia dengan struktur subsidi yang besar, efek negatif inflasi melalui beban belanja subsidi dan sosial secara teoritis cenderung lebih dominan dibandingkan efek positifnya melalui peningkatan basis pajak nominal (Damayanti & Marselina, 2022). Namun inkonsistensi hasil empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa arah pengaruh inflasi terhadap saldo APBN bersifat kontekstual dan perlu diuji ulang pada periode 2024–2026.

Hipotesis 3 (H3): Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap saldo APBN.

Hipotesis 4 (H4): Pertumbuhan penerimaan perpajakan, pertumbuhan belanja pemerintah pusat, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap saldo APBN.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah faktor fundamental dari keberlangsungan penelitian sehingga menjadi acuan dalam pengerjaan penelitian. Dengan adanya kerangka pemikiran maka penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan disertai teori pendukung dan rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitian harus dilakukan, berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Pengaruh parsial (Uji t)
- : Pengaruh simultan (Uji F)